



LAPORAN KINERJA

2020



**BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DAN ORGANISASI INTERNASIONAL**

**SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) periode tahun 2019-2024 melakukan penguatan kelembagaan dalam melaksanakan 3 fungsi utamanya yaitu legislatif, pengawasan dan anggaran, serta fungsi lainnya yaitu diplomasi parlemen. Untuk itu DPR telah menetapkan visi tahun 2019-2024 yaitu "menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat; dan memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah". Pencapaian visi tersebut dapat terwujud apabila seluruh elemen baik Pimpinan dan Anggota DPR RI serta segenap pegawai dilingkungan Setjen dan BK DPR RI menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda DPR RI.

Untuk dapat menyelenggarakan fungsinya dengan optimal serta terwujudnya penguatan kelembagaan DPR RI sebagai lembaga penyeimbang pemerintah, DPR RI harus didukung supporting system yang akuntabel dan berkualitas, salah satunya adalah Setjen DPR RI.

Hal lain yang merupakan penguatan didalam Undang-Undang MD3 adalah diplomasi parlemen sebagai salah satu fungsi Dewan. Diplomasi Parlemen dilakukan sesuai amanat pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut aktif dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada saat ini DPR RI melalui BKSAP DPR RI telah meraih banyak capaian penting dalam mendukung diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai *second track diplomacy*, DPR turut dalam pengambilan keputusan dan resolusi sebagai hasil dari pertemuan dan sidang baik di level bilateral, regional maupun internasional. Ketika

menghadiri berbagai sidang baik regional maupun internasional, BKSAP menyuarakan kepentingan nasional Indonesia dan juga memperjuangkan berbagai resolusi yang bermanfaat bagi orang banyak.

Pada bulan September 2015, para kepala pemerintahan menyepakati sebuah deklarasi berjudul "*Transforming Our World: 2030 Agenda for Sustainable Development*", suatu rangkaian agenda pembangunan yang global yang memiliki 17 tujuan dengan 169 target. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan mengenai pentingnya peran parlemen dalam mendukung terwujudnya agenda pembangunan berkelanjutan tersebut. Hal ini tentunya karena parlemen memiliki fungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan, yang diperlukan untuk mewujudkan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Para periode keanggotaan 2019-2024, DPR RI telah membentuk 51 Group Kerja Sama Bilateral (GKSB). GKSB ini berupaya mendorong peningkatan kerjasama Indonesia dengan Negara sahabat. Selama periode keanggotaan ini. Telah dihasilkan 4 MoU yaitu dengan Fiji, Vanuatu, Mongolia dan Bahrain.

Pada periode 2019-2024 juga mulai diadakan diplomasi individu yang dilakukan oleh DPR RI. Dengan pendekatan individu diharapkan dapat mengakomodir keinginan setiap Anggota Dewan yang ingin melakukan diplomasi individu. Selain itu, diplomasi individu memperluas pergaulan dan kerjasama Anggota DPR RI dengan Anggota parlemen negara sahabat. Diplomasi individu juga dapat menyelesaikan beberapa masalah dengan pendekatan personal.

Keberhasilan DPR RI dalam hal ini BKSAP DPR RI sebagai *second track diplomacy* yang melakukan *multi track diplomacy*, tentu saja tidak terlepas dari dukungan Setjen DPR RI di Biro KSAP dalam memberikan dukungan teknis, administratif maupun keahlian kepada BKSAP DPR RI. Bagi Biro KSAP, dimasukkannya fungsi diplomasi parlemen dalam Perubahan Undang-Undang tentang MD3 menunjukkan pentingnya diplomasi parlemen dalam mendukung kegiatan diplomasi yang dilakukan

oleh pemerintah. Hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi Biro KSAP untuk meningkatkan pelayanan kepada Dewan dalam diplomasi parlemen.

2. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Biro KSAP dibuat sebagai implementasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), yang tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kerjasama Antar Parlemen tahun 2018 adalah bentuk akuntabilitas pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2019 dan sebagai evaluasi untuk perbaikan kinerja Biro Kerjasama Antar Parlemen di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Biro KSAP disusun dengan mengacu kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU tentang MD3)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7/Per-Sekjen/2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI

6. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 400/Sekjen/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekjen Nomor 3/PERSEKJEN/2010 dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2015 dan terakhir dengan Peraturan Sekjen Nomor 7 Tahun 2018, Biro Kerjasama Antar Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kerjasama antar parlemen dan layanan alih Bahasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Biro Kerjasama Antar Parlemen menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Kerjasama Antar Parlemen;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Kerjasama Antar Parlemen;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Kerjasama Antar Parlemen;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Kerjasama Antar Parlemen;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persidangan Badan Kerjasama Antar Parlemen;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang persidangan Badan Kerjasama Antar Parlemen;
- g. Penyelenggaraan persidangan kerjasama organisasi internasional dan dukungan analisis terhadap isu internasional;
- h. Penyelenggaraan persidangan kerjasama organisasi regional dan dukungan analisis terhadap isu regional;
- i. Penyelenggaraan persidangan kerjasama bilateral dan dukungan analisis terhadap isu bilateral;

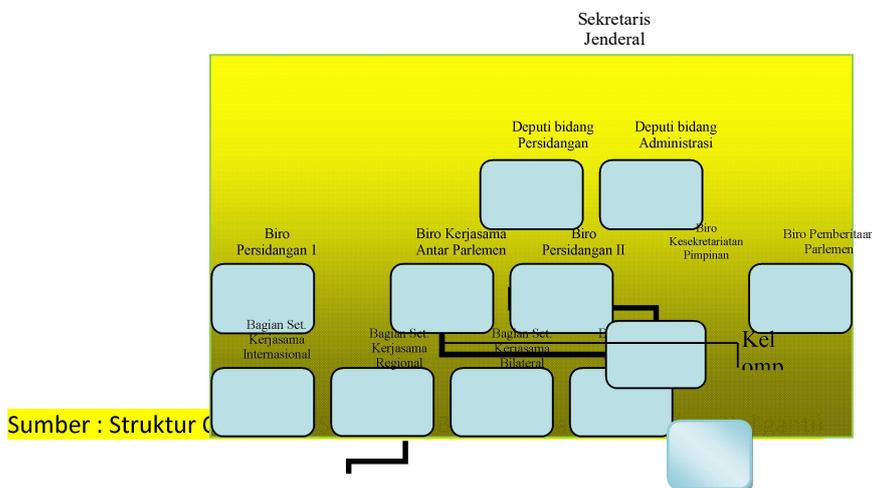
- j. Penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- k. Penyelenggaraan dukungan alih Bahasa;
- l. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Persidangan;
- m. Penyusunan laporan kinerja Biro Kerjasama Antar Parlemen; dan
- n. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro KSAP dibagi menjadi 4 Bagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional (KSI); Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional (KSR); Bagian Sekretariat Kerjasama Bilateral (KSB); Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri (MINLUNA); dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Biro KSAP dalam Struktur Setjen dan BK DPR RI digambarkan dalam gambar berikut ini :

GAMBAR 1

STRUKTUR ORGANISASI BIRO KERJASAMA ANTAR PARLEMEN



4. Mandat dan Peran Strategis

Biro Kerjasama Antar Parlemen memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja diplomasi parlemen. Kegiatan diplomasi parlemen yang dilakukan dengan berbagai cara (*multitradisional diplomacy*) baik individu, bilateral, regional maupun

internasional memerlukan perencanaan dan dukungan teknis, administratif dan keahlian agar efektif dan membawa manfaat bagi berbagai pihak.

Peran strategis BKSAP dalam penyiapan delegasi ke siding-sidang regional maupun internasional serta menyampaikan hasil-hasil siding yang dapat diadopsi ke Komisi terkait dirasakan sangat penting.

Selain itu, BKSAP adalah etalase diplomasi parlemen DPR RI. Bagaimana menginformasikan hasil-hasil pertemuan yang dilakukan oleh BKSAP baik didalam dan luar negeri, menyampaikan kepada masyarakat luas perkembangan isu-isu terkini dan posisi DPR RI dalam menyikapi suatu isu internasional, serta menjalin kerjasama dengan parlemen negara sahabat maupun organisasi internasional, menjadi tugas Biro KSAP untuk mendukung BKSAP melakukan hal-hal tersebut.

Melalui Perencanaan organisasi, sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, administrasi serta dukungan teknis lainnya, Biro Kerjasama Antar Parlemen mendukung dan memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan misi diplomasi Parlemen yang dilaksanakan oleh DPR RI.

Berbagai keterlibatan DPR RI di kancah Internasional tersebut didukung oleh Biro Kerjasama Antar Parlemen (KSAP) sebagai bagian dari Kesekretariatan Jenderal yang memberikan dukungan teknis dan Keahlian kepada Dewan.

Saat ini Biro KSAP bukan saja memberikan dukungan kepada anggota BKSAP yang berjumlah 50 orang, namun juga kepada Pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR RI yang berjumlah 560 orang melalui program Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) dan kunjungan diplomasi parlemen perorangan. Bukan itu saja, Biro KSAP juga memberi dukungan kepada anggota parlemen sedunia yang menjadi anggota Global Parliamentarians against Corruption (GOPAC) mengingat saat ini Indonesia menjadi markas besar dari organisasi tersebut. Pada tahun 2019 dengan diselenggarakannya *World Parliamentary Forum on Sustainable Development* yang ketiga di Bali pada bulan September 2019 atas inisiatif Indonesia, Biro KSAP menjadi sekretariat dari sidang tersebut.

5. Program Reformasi Birokrasi L menuju wilayah Zona Integritas

Pada tahun 2015-2019, Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Setjen DPR RI menjadi Biro KSAP sebagai unit pengungkit Reformasi Birokrasi pada tahun 2018, yaitu program quick win Pembuatan Sistem Perjalanan Luar Negeri Anggota Dewan yang merupakan inovasi aplikasi yang dilakukan Biro KSAP sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan bagi Pimpinan DPR RI dalam memberikan persetujuan untuk pengajuan kunjungan kerja luar negeri DPR RI yang dilakukan oleh komisi/badan di DPR RI.

Pada tahun 2019, Biro KSAP ditetapkan sebagai salah satu zona integritas dilingkungan Setjen DPR RI yang menjadikan Biro KSAP sebagai salah satu role model unit pelayan dilingkungan Setjen DPR RI yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta pelayanan yang prima.

6. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian laporan kinerja Biro KSAP Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi, penjabaran peran strategis Biro KSAP serta Reformasi Birokrasi yang dilakukan di Biro KSAP

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan penjelasan rincian mengenai rencana kinerja Biro KSAP dan uraian mengenai pengukuran kinerja di Biro KSAP

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi : Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

b) Evaluasi dan analisis capaian kinerja : Pada subbab ini diuraikan evaluasi atas pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta membandingkan

realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya dan menjelaskan hal-hal yang menyebabkan tercapai dan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan di perjanjian kinerja

- c) Realisasi Anggaran : Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja
- d) Kinerja lain-lain : Pada subbab ini diuraikan capaian Biro KSAP dalam upaya penyempurnaan proses bisnis maupun peningkatan layanan publik.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Biro KSAP serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Biro KSAP untuk meningkatkan kinerjanya.

- 5. Lampiran : Perjanjian Kinerja Biro KSAP, Data Pegawai di lingkungan Biro KSAP, Daftar Pengiriman Delegasi, Daftar dukungan kegiatan rapat-rapat courtesy call dan friendly talk, Laporan pelaksanaan Zona Integritas; Data survey internal, Foto-foto output kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pemberian dukungan terhadap tiga fungsi DPR RI, program kerja Biro KSAP mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Persidangan dan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2015-2019 sebagai dasar dalam Menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

Biro Kerjasama Antar Parlemen mengacu pada visi dan misi Deputi Bidang Persidangan, dengan fokus pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, yaitu menyiapkan dan melaksanakan dukungan teknis dan administrative di bidang Persidangan dan Kerjasama antar Parlemen, sehingga visi Biro KSAP, yaitu “Terwujudnya dukungan kegiatan kerjasama antar parlemen yang berkualitas, professional dan akuntabel”.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Biro KSAP, yaitu:

- a) Mewujudkan analisis isu-isu bilateral, yang berkualitas dan akuntabel serta dukungan teknis dan administrasi yang cepat dan tepat, serta alih Bahasa yang akurat.
- b) Mewujudkan analisis isu-isu regional yang berkualitas dan akuntabel serta dukungan teknis dan administrasi yang cepat dan tepat.
- c) Mewujudkan analisis isu-isu internasional yang berkualitas dan akuntabel serta dukungan teknis dan administrasi yang cepat dan tepat.
- d) Mengembangkan Database yang akurat dan informasi terbaru untuk mendukung kegiatan kerjasama antar parlemen.

B. Penetapan Kinerja 2019

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Menteri Negara Pendayagunaan Negara segera menindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang penetapan kinerja, Biro BKAP telah membuat membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2019 berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan.

Tujuan dibuatnya penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Satker Satjen			
1	Mingkatnya kualitas dukungan diplomasi parlemen	1. Persentase dukungan kegiatan kerjasama internasional yang sesuai standar	100%
		2. Persentase dukungan kegiatan kerjasama regional yang sesuai standar	100%
		3. Persentase dukungan kegiatan kerjasama bilateral yang sesuai standar	100%
		4. Persentase dukungan kegiatan kerjasama diplomasi perorangan yang sesuai standar	100%

Satker Dewan			
1.	Layanan Sidang.Konferensi di dalam negeri	Jumlah penyelenggaraan konferensi / seminar regional / internasional	2 konferensi
2.	Layanan pengebangan Hubungan Kerjasama Luar Negri	Jumlah keikutsertaan DPR RI di organisasi Regional / Internasional dalam rangka diplomasi parlemen	34 kali
3.	Layanan pelaksanaan peran diplomasi Anggota DPR RI	Jumlah Anggota DPR RI yang melaksanakan peran diplomasi parlemen	100 Anggota

Yang dimaksud dengan Persentase dukungan kegiatan kerjasama Internasional yang sesuai standar dihitung berdasarkan terlaksananya kerjasama Internasional yang dilakukan oleh DPR RI dan Badan Kerjasama Antar Parlemen. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro KSAP adalah dukungan teknis dan administratif maupun substansi atas kegiatan kerjasama internasional yang dilakukan oleh DPR RI. Perhitungan yang sama juga dilakukan untuk indikator lainnya, namun dengan kegiatan kerjasama yang berbeda-beda sesuai kerjasama yang dilakukan. Target untuk setiap indikator tersebut adalah 100%. Sedangkan untuk Pencapaian kinerja per bulan guna monitoring dan evaluasi dilakukan dengan perhitungan $1/12 \times 100\%$, mengingat sulitnya memperkirakan jumlah kerjasama yang akan dijalin oleh BKSAP.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan standar yang ada di Biro KSAP, baik Standar Operasional Prosedur untuk beberapa kegiatan, seperti SOP Pengiriman Delegasi, SOP Penterjemahan maupun SOP yang terkait unit kerja lain, seperti SOP Pengajuan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Setker Setjen, Pelayanan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Paket Meeting Satker Setjen.

Untuk Satker Dewan, karena Kepala Biro KSAP merupakan Penanggungjawaban komitmen untuk Anggaran Satker Dewan, maka perlu dalam Laporan Kinerja ini menyampaikan realisasi anggota satker dewan dewan sebagai bagian dari kinerja Biro KSAP selama tahun 2019 ini.

Peeriode tahun 2019, Biro KSAP melakukan perubahan penetapan sasaran program/kegiatan dan indikator kinerja serta target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini bertujuan agar mendekati capaian kinerja yang sebenarnya telah diraih sertah lebih akuntabel. Berikut ini sandingan Sasaran program/kegiatan dan indikator kinerja Biro KSAP:

Tabel 2

Matriks Perubahan Indikator Kinerja Biro KSAP tahun 2015-2019

Tahun 2015 - 2018			Tahun 2019	
Indikator kinerja	Target		Indikator kinerja	target
Jumlah bahan kebijakan BSAP	4 dokumen Biro		-	100%
jumlah Materi Kerjasama Organisasi Internasional	5 dokumen		Persentase dukungan kegiatan kerjasama internasional yang sesuai standar	100%
Jumlah materi kerjasama organisasi regional	5 dokumen		Persentase dukungan kegiatan kerjasama regional yang sesuai standar	100%
Jumlah materi kerjasama bilateral	5 dokumen		Persentase dukungan kegiatan bilateral yang sesuai standar	100%
Jumlah materi administrasi kegiatan luar negeri anggota	5 dokumen		Persentase dukungan kegiatan kerjasama diplomasi perorangan yang sesuai standar	100%

BAB III

Akuntabilitas Kerja

A. Pengukuran Capaian Kerja

Sebagai perwujudan dari akuntabilitas kerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian atas sasaran program/kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja. Gambaran pengukuran capaian kinerja Biro KSAP DPR RI Tahun 2019 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3

Capaian Kinerja Biro KSAP Tahun 2019

Sasaran Program/kegiatan	Indikator kinerja	target	realisasi	capaian
Satker satjen				
Meningkatnya kualitas dukungan diplomasi parlemen	Persentase dukungan kegiatan kerjasama internasional yang sesuai standar	100%	100%	100%
	Persentase dukungan kegiatan kerjasama regional yang sesuai standar	100%	100%	100%
	Persentase dukungan kegiatan bilateral yang sesuai standar	100%	100%	100%
	Persentase dukungan kegiatan kerjasama diplomasi perorangan yang sesuai standar	100%	100%	100%

Satker dewan:				
Layanan sidang.konferensi di dalam negeri	Jumlah penyelenggaraan konferensi/seminar regional/internasional	2 konferensi	1 konferensi	50%
Layanan pengembangan hubungan kerjasama luar negeri	Jumlah keikutsertaan DPR RI di organisasi regional/internasional dalam rangka diplomasi parlemen	34 kali	45 kali	132,35%
Layanan pelaksanaan peran diplomasi anggota DPR RI	Jumlah anggota DPR RI yang melaksanakan peran diplomasi parlemen	1000 anggota	888 anggota	88%

Dari table tersebut diatas terlihat bahwa pada tahun 2019 capaian kinerja Satker Setjen telah terealisasi sebesar 100% untuk 4 indikator kerjanya. Hal ini karena setiap kegiatan diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI khususnya BKSAP DPR RI, seluruhnya mendapat dukungan baik teknis, administrasi maupun substansi dari Biro KSAP.

Sedangkan untuk Satker Dewan untuk indikator kinerja Layanan Sidang/Konferensi didalam negeri mencapai 50% mengingat pada tahun 2019 merupakan tahun kampanye dan periode keanggotaan DPR RI 2014-2019 hanya sampai akhir September 2019 sehingga pada tahun 2019 diputuskan hanya menyelenggarakan 1 kali konferensi; indikator kinerja Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri telah mencapai 132,35%, sedangkan untuk Layanan Pelaksanaan Peran Diplomasi Anggota DPR RI mencapai 88%. Hal ini disebabkan pada akhir tahun 2019, sebagian anggota tidak melaksanakan peran diplomasi perorangan karena kegiatan lain baik

dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan dan kampanye dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR RI Periode 2019-2024.

Capaian kerja Biro KSAP pada tahun 2014-2019 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan terdapat perbedaan indikator maupun target dalam penetapan kinerja yang dilakukan oleh Biro KSAP.

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Sasaran
Meningkatnya kualitas dukungan Diplomasi Parlemen

Indikator 1		
Persentase dukungan kegiatan kerjasama Internasional Yang sesuai standar	Target	100%
	Realisasi	100%
	Capaian	100%

Penilaian kinerja “Persentase dukungan kegiatan kerjasama Internasional yang sesuai standar” berdasarkan terlaksananya kerjasama Internasional yang dilakukan oleh DPR RI/Badan Kerjasama Antar Parlemen. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Kerjasama Antar Parlemen adalah terlaksananya dukungan kerjasama Internasional baik itu dukungan administrative maupun dukungan substansi.

Pada tahun 2019, terdapat 19 kali pengiriman Delegasi ke sidang Internasional seperti ke sidang *Inter Parliamentary Union* di Jenewa dan Beograd, Sidang *Parliamentary Union* atau *OIC (OECD)* di Paris, Sidang *Young Parliamentarians*, dan sebagainya. Biro KSAP memberikan dukungan atas persiapan, pelaksanaan maupun pelaporan atas kegiatan Delegasi ke Sidang-Sidang tersebut. Untuk mendukung Delegasi pada tahap persiapan, Biro KSAP melakukan kegiatan rapat-rapat di luar jam kantor, mengundang pakar, dan juga mengirimkan Delegasi Setjen DPR RI ke Sidang ASGP-IPU dan penerjemahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan delegasi ke sidang tersebut, penerjemahan langsung, maupun penerjemahan dokumen-dokumen hasil sidang yang

akan disampaikan ke Komisi terkait di DPR maupun pemerintah. Realisasi sebesar 100% dihitung dari seluruh pengiriman delegasi ke sidang Internasional telah mendapatkan dukungan dari Biro KSAP. Dukungan tersebut baik berupa administrasi maupun substansi. Sehingga dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%, maka capaian untuk indikator ini sebesar 100%.

Output atas dukungan Biro KSAP kepada DPR RI dan BKSAP dalam menghadiri sidang-sidang Internasional berupa pembuatan itenary delegasi, agenda delegasi, draft intervensi delegasi, draft SK Pimpinan, Draft Resolusi, Buku Posisi Delegasi, Leaflet, Draft Press Release, Draft Laporan Delegasi serta administrasi perjalanan.

Indikator kinerja Persentase dukungan kegiatan kerjasama Internasional yang dilakukan sesuai standar tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena indikator ini merupakan hal baru yang merupakan penyempurnaan dari indikator tahun-tahun sebelumnya. Namun jumlah pengiriman Delegasi DPR RI/BKSAP DPR RI ke Sidang Internasional sejak tahun 2015-2019 serta output dukungan Biro KSAP atas kegiatan tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4
Jumlah Pengiriman Delegasi DPR RI/BKSAP ke Sidang Internasional dan output dukungan kegiatan Biro KSAP Tahun 2015-2019

Output dukungan kegiatan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Itinerary Delegasi	14	27	29	26	19
Agenda Delegasi	14	27	29	26	19
Draft Intervensi Delegasi	14	27	29	26	19
Draft SK Pimpinan Delegasi	14	27	29	26	19
Draft Resolusi	14	27	29	26	19
Buku Posisi Delegasi	14	27	29	26	19
Leaflet Delegasi	14	27	29	26	19
Buku Saku Delegasi	14	27	29	26	19

Press Release Sidang	14	27	29	26	19
Draft Laporan Delegasi	14	27	29	26	19
Administrasi Perjalanan	14	27	29	26	19

jika melihat dari tabel diatas maka terjadi kenaikan jumlah pengiriman delegasi ke Sidang Internasional pada tahun kedua dan ketiga keanggotaan DPR RI Periode 2014-2019, namun mengalami penurunan dalam jumlah ditahun 2018 dan 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 masa keanggotaan hanya sampai bulan akhir bulan September 2019 dan masa-masa kampanye. Namun demikian seluruh pengiriman delegasi telah mendapatkan dukungan administratif maupun substansi sebesar 100% pada setiap tahunnya walaupun dalam hal jumlah berbeda-beda. Daftar pengiriman delegasi terlampir.

Gambar 2

Output Dukungan Delegasi DPR RI/BKSAP ke Sidang Internasional Tahun 2015-2019



Selain itu, Biro KSAP juga memberikan dukungan administrasi dan substansi dalam Penyelenggaraan Konferensi yang diinisiasi DPR RI untuk agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu *the 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable*

Development Forum (the 3rd WPFSD), kegiatan *the 7th GOPAC Conference* yang berlangsung di Doha, maupun kegiatan Kunker dalam negeri yang dilakukan dalam rangka Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke Provinsi dan Nusa Tenggara Barat, serta *BKSAP Day* ke Provinsi Bali.

Indikator 2		
Persentase dukungan kegiatan kerjasama Regional yang sesuai standar	Target	100%
	Realisasi	100%
	Capaian	100%

Penilaian kinerja “Persentase dukungan kegiatan kerjasama Regional yang sesuai standar” berdasarkan terlaksananya kerjasama Regional yang dilakukan oleh DPR RI/Badan Kerjasama Antar Parlemen. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Kerjasama Antar Parlemen adalah terlaksananya dukungan kerjasama Regional baik itu dukungan administrative maupun dukungan substansi.

Pada tahun 2019, terdapat 12 kali pengiriman Delegasi ke sidang Regional seperti ke sidang *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*, *Sidang Asia Parliamentary Assembly*, *Sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly*, *Sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs*, *Sidang Speakers of the Eurasian Countries Parliaments*, *Sidang Asia Pacific Summit*, dan *Sidang Asia Pacific Parliamentarians Conference on Environment and Development*. Biro KSAP memberikan dukungan atas persiapan, pelaksanaan maupun pelaporan atas kegiatan Delegasi ke Sidang-Sidang tersebut. Untuk mendukung Delegasi pada tahap persiapan, Biro KSAP melakukan kegiatan rapat-rapat di luar jam kantor, mengundang pakar, dan juga mengirimkan Delegasi Setjen DPR RI ke sidang tersebut dan penterjemahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan delegasi ke sidang tersebut, penterjemahan langsung, maupun penterjemahan dokumen-dokumen hasil sidang yang akan disampaikan ke Komisi terkait di DPR maupun pemerintah. Realisasi sebesar 100% dihitung dari seluruh pengiriman delegasi ke sidang Internasional telah mendapatkan dukungan dari Biro

KSAP. Dukungan tersebut baik berupa administrasi maupun substansi. Sehingga dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%, maka capaian untuk indikator ini sebesar 100%.

Output atas dukungan Biro KSAP kepada DPR RI dan BKSAP dalam menghadiri sidang-sidang Regional berupa pembuatan itenary delegasi, agenda delegasi, draft intervensi delegasi, draft SK Pimpinan, Draft Resolusi, Buku Posisi Delegasi, Leaflet, Draft Press Release, Draft Laporan Delegasi serta administrasi perjalanan.

Indikator kinerja Persentase dukungan kegiatan kerjasama Regional yang dilakukan sesuai standar tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena indikator ini merupakan hal baru yang merupakan penyempurnaan dari indikator tahun-tahun sebelumnya. Namun jumlah pengiriman Delegasi DPR RI/BKSAP DPR RI ke Sidang Regional sejak tahun 2015-2019 serta output dukungan Biro KSAP atas kegiatan tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5
Jumlah Pengiriman Delegasi DPR RI/BKSAP ke Sidang Regional dan output dukungan kegiatan Biro KSAP Tahun 2015-2019

Output dukungan kegiatan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Itinerary Delegasi	8	13	14	10	12
Agenda Delegasi	8	13	14	10	12
Draft Intervensi Delegasi	8	13	14	10	12
Draft SK Pimpinan Delegasi	8	13	14	10	12
Draft Resolusi	8	13	14	10	12
Buku Posisi Delegasi	8	13	14	10	12
Leaflet Delegasi	8	13	14	10	12
Buku Saku Delegasi	8	13	14	10	12
Press Release Sidang	8	13	14	10	12
Draft Laporan Delegasi	8	13	14	10	12
Administrasi Perjalanan	8	13	14	10	12

jika melihat dari tabel diatas maka terjadi kenaikan jumlah pengiriman delegasi ke Sidang Regional pada tahun kedua dan ketiga keanggotaan DPR RI Periode 2014-2019, namun mengalami penurunan dalam jumlah ditahun 2018 dan 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 masa keanggotaan hanya sampai bulan akhir bulan September 2019 dan masa-masa kampanye. Namun demikian seluruh pengiriman delegasi telah mendapatkan dukungan administratif maupun substansi sebesar 100% pada setiap tahunnya walaupun dalam hal jumlah berbeda-beda. Daftar pengiriman delegasi terlampir.

Gambar 3
Output Dukungan Delegasi DPR RI/BKSAP ke Sidang Regional
Tahun 2015-2019



Selain itu, Biro KSAP juga memberikan dukungan administrasi dan substansi dalam kegiatan seminar yang dilakukan DPR RI berjudul '*Laying the Foudation for future Comperation in Promoting Accountability and Transparancey in ASEAN*' pada tanggal 16 februari 2019, serta Kunker dalam negeri yang dilakukan dalam rangka Panja Kerjasama

Ekonomi Regional ke Provisin Banten dan Nusa Tenggara Barat, serta *BKSAP Day* ke Provinsi Bali.

Indikator 3		
Persentase dukungan kegiatan kerjasama Bilateral yang sesuai standar	Target	100%
	Realisasi	100%
	Capaian	100%

Penilaian kinerja “Persentase dukungan kegiatan kerjasama Bilateral yang sesuai standar” berdasarkan terlaksananya kerjasama Bilateral yang dilakukan oleh DPR RI/Badan Kerjasama Antar Parlemen. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Kerjasama Antar Parlemen adalah terlaksananya dukungan kerjasama Bilateral baik itu dukungan administrative maupun dukungan substansi.

Pada tahun 2019, terdapat 14 kali pengiriman Delegasi dalam rangka kerjasama Bilateral ke negara-negara sahabat seperti Arab Saudi Selandia Baru, Portugal, Perancis, Brazil, Korea Utara, Fiji, Turki, Kuba Ekuador, Argentina, Ethiopia dan Ceko. Biro KSAP memberikan dukungan atas persiapan, pelaksanaan maupun pelaporan atas kegiatan Delegasi dalam rangka kerjasama Bilateral ke negara-negara sahabat. Untuk mendukung Delegasi pada tahap persiapan, Biro KSAP melakukan kegiatan rapat-rapat di luar jam kantor, mengundang pakar, dan juga mengirimkan Delegasi Setjen DPR RI ke sidang tersebut dan penterjemahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan delegasi ke sidang tersebut, dan pembuatan draft Memorandum of Understanding. Realisasi sebesar 100% dihitung dari seluruh pengiriman delegasi ke sidang Internasional telah mendapatkan dukungan dari Biro KSAP. Dukungan tersebut baik berupa administrasi maupun substansi. Sehingga dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%, maka capaian untuk indikator ini sebesar 100%.

Output atas dukungan Biro KSAP kepada DPR RI dan BKSAP dalam melakukan Kerjasama bilateral berupa pembuatan intenary delegasi, agenda delegasi, draft

intervensi delegasi, draft SK Pimpinan, Draft Resolusi, Buku Posisi Delegasi, Leaflet, Draft Press Release, Draft Laporan Delegasi serta administrasi perjalanan.

Indikator kinerja Persentase dukungan kegiatan kerjasama Bilateral yang dilakukan sesuai standar tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena indikator ini merupakan hal baru yang merupakan penyempurnaan dari indikator tahun-tahun sebelumnya. Namun jumlah pengiriman Delegasi DPR RI/BKSAP DPR RI ke Sidang Regional sejak tahun 2015-2019 serta output dukungan Biro KSAP atas kegiatan tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6
Jumlah Pengiriman Delegasi DPR RI/BKSAP ke Sidang Bilateral dan output dukungan kegiatan Biro KSAP Tahun 2015-2019

Output dukungan Kegiatan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Itinerary Delegasi	6	21	17	18	14
Agenda Delegasi	6	21	17	18	14
Draft Intervensi Delegasi	6	21	17	18	14
Draft SK Pimpinan Delegasi	6	21	17	18	14
Draft Resolusi	6	21	17	18	14
Buku Posisi Delegasi	6	21	17	18	14
Leaflet Delegasi	6	21	17	18	14
Buku Saku Delegasi	6	21	17	18	14
Press Release Sidang	6	21	17	18	14
Draft Laporan Delegasi	6	21	17	18	14
Administrasi Perjalanan	6	21	17	18	14

jika melihat dari tabel diatas maka terjadi kenaikan jumlah pengiriman delegasi ke Sidang Regional pada tahun kedua dan ketiga keanggotaan DPR RI Periode 2014-2019, namun mengalami penurunan dalam jumlah ditahun 2018 dan 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 masa keanggotaan hanya sampai bulan akhir bulan September 2019 dan masa-masa kampanye. Namun demikian seluruh pengiriman

delegasi telah mendapatkan dukungan administratif maupun substansi sebesar 100% pada setiap tahunnya walaupun dalam hal jumlah berbeda-beda. Daftar pengiriman delegasi terlampir.

Gambar 4

**Ouput Dukungan Delegasi DPR RI/BKSAP dalam Kerjasama Bilateral
Tahun 2015-2019**



Selain memberikan dukungan dalam melakukan kunjungan Kerja dalam rangka GKSBB maupun Kunjungan Teknis dalam rangka kerjasama Bilateral, Biro KSAP juga memberi dukungan administrative dalam hal penajakan ke parlemen luar negeri bagi seluruh Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI (Pimpinan DPR, Badan, komisi-komisi, Pansus) dan juga Sekretariat Jenderal.

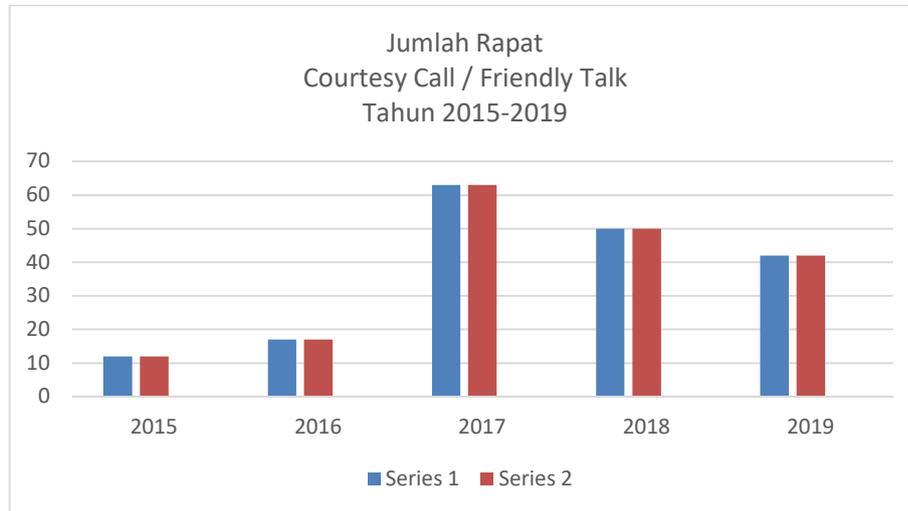
Disamping itu Biro KSAP juga memberi dukungan dan fasilitasi kegiatan menerima tamu-tamu asing baik courtesy call, friendly talk, dan sebagainya. Berikut ini data jumlah Penerima tamu-tamu asing:

Tabel 7
Jumlah rapat-rapat Courtesy Call/Friendly Talk
Tahun 2015-2019

Output Dukungan Kegiatan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Draft Pointers	15	27	64	50	43
Draft Laporan	15	27	64	50	43
Singkat					

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tahun 2019 penerimaan tamu asing berjumlah 43 yang berarti terjadi penurunan jumlah penerimaan tamu asing di DPR RI jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 50 kali. Penurunan tersebut dikarenakan untuk tahun 2019, merupakan tahun kampanye dan juga berakhir pada tanggal 30 September. Pada awal keanggotaan DPR RI periode 2019-2024 belum terdapat penerimaan tamu, karena DPR RI masih dalam penyusunan dan penetapan Pimpinan maupun Anggota di alat kelengkapan dewan.

Gambar 5
Output Dukungan Kegiatan Rapat Courtesy Call/Friendly Talk
DPR RI Tahun 2015-2019



Indikator 4		
Persentase dukungan kegiatan kerjasama Diplomasi Perorangan yang sesuai standar	Target	100%
	Realisasi	100%
	Capaian	100%

Penilaian kinerja “Persentase dukungan kegiatan kerjasama Diplomasi Perorangan yang sesuai standar” berdasarkan terlaksananya kerjasama diplomasi perorangan yang dilakukan oleh DPR RI. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Kerjasama Antar Parlemen adalah terlaksananya dukungan kerjasama Diplomasi Perorangan berupa dukungan administratif maupun dukungan substansi.

Pada tahun 2019, terdapat 88 Anggota DPR RI melakukan kegiatan diplomasi perorangan ke negara-negara sahabat. Untuk mendukung Delegasi pada tahap persiapan, Biro KSAP melakukan kegiatan rapat-rapat diluar jam kantor, penjajakan, penterjemahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan dokumen perjalanan. Realisasi sebesar 100% dihitung dari seluruh kegiatan diplomasi perorangan telah

mendapatkan dukungan dari Biro KSAP. Dukungan tersebut baik berupa administrasi maupun substansi. Sehingga dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%, maka capaian untuk indikator ini sebesar 100%.

Output atas dukungan Biro KSAP kepada DPR RI dan BKSAP dalam melakukan diplomasi perorangan berupa pembuatan itinerary delegasi, agenda delegasi, Draft SK Pimpinan Dewan, Dokumen peninjauan dan administrasi perjalanan.

Indikator kinerja persentase dukungan kegiatan kerjasama diplomasi perorangan yang dilakukan sesuai standar tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena indikator ini merupakan hal baru yang merupakan penyempurnaan dari indikator tahun-tahun sebelumnya. Namun jumlah pengiriman Delegasi DPR RI yang melakukan kerjasama Diplomasi Perorangan sejak tahun 2015-2019 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 8

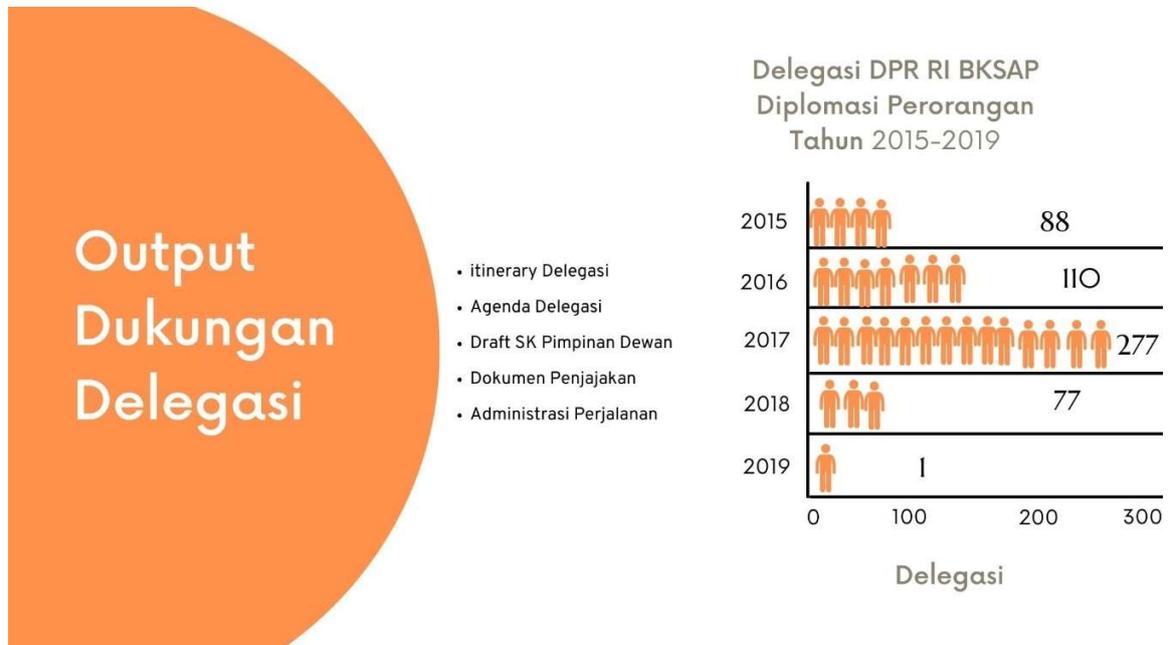
Jumlah Pengiriman Delegasi BKSAP dalam Kerjasama Diplomasi Perorangan dan Output Dukungan Kegiatan Tahun 2015-2019

Output Dukungan Kegiatan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Itinerary Delegasi	1	77	227	118	88
Agenda Delegasi	1	77	227	118	88
Draft SK Pimpinan Dewan	1	77	227	118	88
Laporan Delegasi	1	77	227	118	88
Administrasi Perjalanan	1	77	227	118	88

Catatan : jumlah dokumen berdasarkan jumlah negara yang dikunjungi

Dari tabel diatas terjadi kenaikan jumlah pengiriman delegasi perorangan pada tahun ketiga keanggotaan DPR RI Periode 2014-2019, namun mengalami penurunan ditahun 2018, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan

pada tahun 2019 anggota foku kepada persiapan pemilu. Seluruh pengiriman delegasi telah mendapatkan dukungan administratif maupun substansi sebesar 100% pada setiap tahunnya walaupun dalam hal jumlah berbeda-beda. Daftar pengiriman delegasi terlampir.



Selain memberikan dukungan dalam kegiatan kerjasama Diplomasi Perorangan, Biro KSAP juga memberikan dukungan penterjemahan baik lisan maupun tertulis untuk membantu tugas-tugas Pimpinan DPR RI, seluruh Alat Kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI, dengan output kegiatan selama tahu 2019, sebagai berikut :

Tabel 9

Output Kegiatan Penterjemahan Lisan dan Tertulis Tahun 2019

No	Terjemahan Lisan		Terjemahan Tertulis	
	Jenis	Jumlah	Jenis Dokumen	Jumlah
1	Bahasa Inggris	39 kegiatan	Kerangka Acuan	22 item
2	Bahasa Lainnya	6 kegiatan	Surat Menyurat	158 item
3	Bahasa Isyarat	2 kegiatan	Materi Sidang/Rapat	49 item
4			Daftar Riwayat Hidup	37 item
5			Situs (Website)	1 item

6			Buku/Makalah/Leaflet	5 item
7			Dokumen Berbahasa Arab, Perancis, Spanyol, Jepang	27 item
Jumlah		47 kegiatan	Jumlah	299 item

C. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan Realisasi Anggaran

Biro KSAP Setjen DPR RI selaku Pengguna Anggaran memiliki kewenangan terhadap 2 (dua) Pagu DIPA, yaitu Pagu DIPA Satker Setjen dan Pagu DIPA Satker Dewan. Pada tahun 2019, total keseluruhan Pagu Anggaran di Biro KSAP Setjen DPR RI sebesar Rp.110.956.392.000,00 sebagaimana terlihat dalam tabel 10 dibawah ini.

Tabel 10

Pagu Anggaran BKSAP DPR RI Tahun 2019

No	Satker	Pagu Anggaran
1	Dewan	Rp.106.559.712.000,00
2	Setjen	Rp.4.396.680.000,00
Jumlah		Rp.110.956.392.000,00

Sumber : Bagian Perencanaan

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 31 Ayat (1) huruf j disebutkan bahwa “Pimpinan DPR Menyusun rencana kerja dan anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR”. Implementasi atas pasal tersebut dijabarkan dalam pasal lain pada peraturan yang sama, dimana penyusunan rencana kerja dan anggaran DPR dilakukan oleh masing-masing Alat Kelengkapan Dewan dan diserahkan kepada Badan Urusan Rumah Tangga untuk ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal DPR RI. Oleh karena itu, untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran Satker Dewan diserahkan kepada masing-masing Alat Kelengkapan Dewan.

Dari Pagu Anggaran BKSAP DPR RI pada tahun 2019 sebesar Rp.110.956.392.000,00 telah tercapai realisasi anggaran sebesar Rp.92.964.051.854,00 atau 83,78% dari pagu. Besaran realisasi anggaran tersebut berasal dari realisasi anggaran Satker Setjen dan Satker Dewan.

Pagu yang dikelola Satker Dewan sebesar Rp.106.559.712.000,00, telah tercapai realisasi anggaran sebesar Rp.89.196.771.454,00 atau 83,71% dari pagu. Sedangkan pagu yang dikelola Satker Setjen sebesar Rp.4.396.680.000,00 telah tercapai realisasi anggaran sebesar Rp.3.767.280.400,00 atau sebesar 85,68% dari pagu.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Biro KSAP telah berhasil meningkatkan kinerja keuangannya. Pada tahun 2018 capaian kinerja Satker Dewan dan Satker Setjen di Biro KSAP sebesar 68,15% dari total pagu sebesar Rp.188.752.362.000,00. Peningkatan kinerja tersebut tentu saja berkat komunikasi dan koordinasi baik dengan Pimpinan BKSAP maupun unit terkait antara lain dengan mengadakan rapat-rapat koordinasi sehingga jika masih terdapat anggaran yang belum terserap, segera dilakukan revisi Anggaran agar penyerapannya optimal.

Anggaran Satker Dewan dipergunakan untuk kegiatan layanan sidang konferensi didalam negeri berupa penyelenggaraan Sidang *The 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)* di Bali, Layanan pengembangan hubungan kerjasama luar negeri berupa keikutsertaan DPR RI dalam sidang-sidang Internasional, regional maupun kegiatan kerjasama bilateral sebanyak 45 kali dan layanan pelaksanaan peran diplomasi Anggota DPR RI sebanyak 88 orang.

Tidak tercapainya Anggaran Satker Dewan secara optimal disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tidak terlaksananya konferensi didalam negeri karena waktu yang sangat singkat sementara kegiatan pengiriman delegasi cukup padat, selain itu juga karena tahun 2019 merupakan masa kampanye sehingga banyak anggota tidak dapat berangkat ke sidang-sidang internasional/regional dan memilih untuk konsentrasi di daerah konstituennya.

Sedangkan Anggaran Satker Setjen digunakan untuk rapat koordinasi internal, penterjemahan, rapat koordinasi dengan pihak lain, Honorarium tim zona integritas dan tim penilai kenaikan pangkat jabatan fungsional penterjemah dan penyusun pedoman kenaikan pangkat jabatan fungsional penterjemah menghadiri konferensi ASGP di Maroko, Qatar, Serbia, serta ke Australia, jasa konsultasi penyelenggaraan konferensi, souvenir, FGD, Jamuan rapat, pembuatan video zona integritas dan sebagainya.

Tabel 11

Persandingan Realisasi Anggaran Satker Dewan

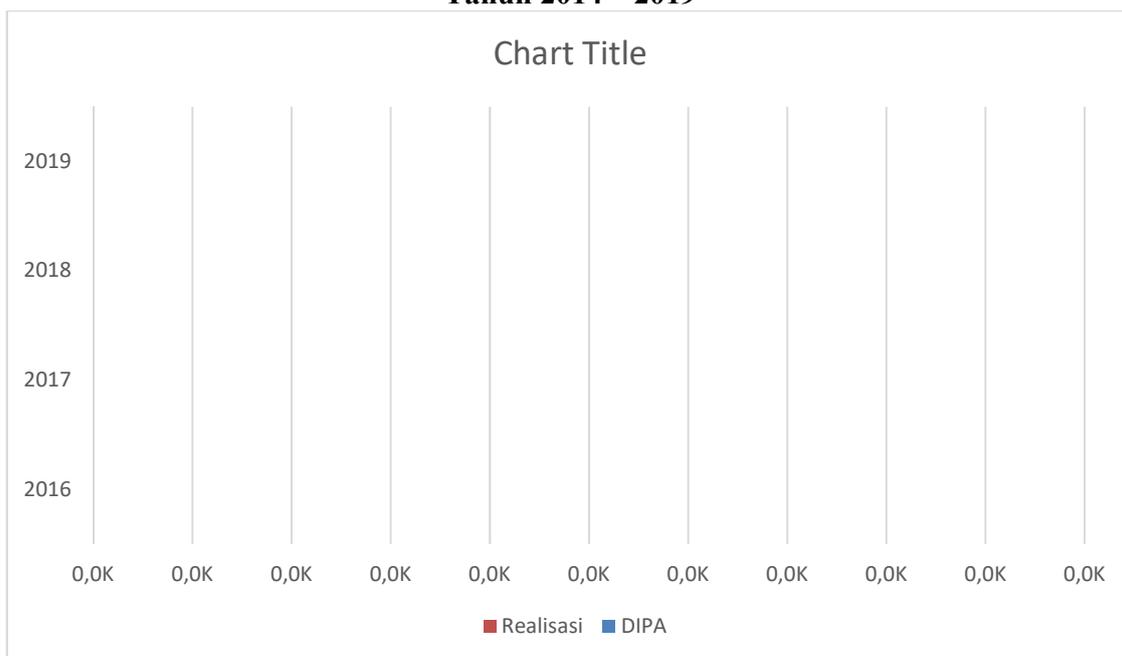
Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019

Tahun	DIPA (Revisi)	Realisasi	Persentase
2016	Rp.151.915.572.000,00	Rp.101.378.486.407,00	66,73%
2017	Rp.185.496.767.000,00	Rp.134.162.509.672,00	72,33%
2018	Rp.185.087.733.000,00	Rp.125.563.005.487,00	67,84%
2019	Rp.106.559.712.000,00	Rp.89.196.771.454,00	83,71%

Sumber : Bagian Perencanaan, Januari 2019

Gambar 7
Persandingan Realisasi Anggaran Satker Dewan
Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019

Realisasi Anggaran
Satker Dewan
Tahun 2014 – 2019

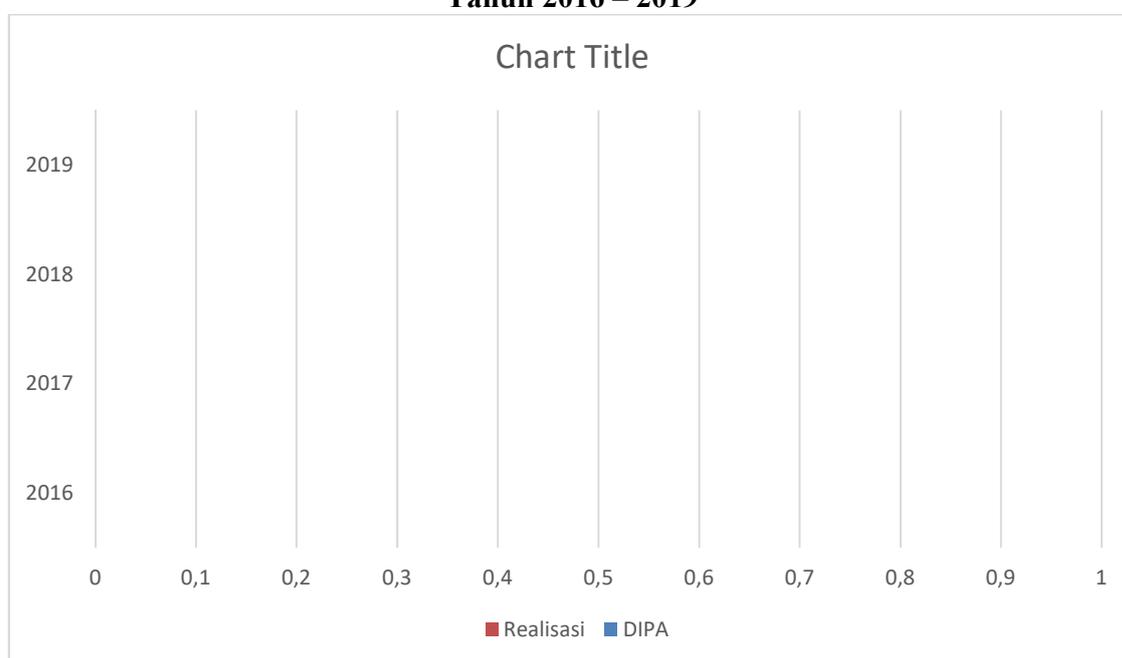


Tabel 12
Persandingan Realisasi Anggaran Satker Setjen
Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019

Tahun	DIPA (Revisi)	Realisasi	Persentase
2016	1.333.856.000,00	536.237.600,00	40,30%
2017	1.071.747.000,00	730.347.400,00	68,15%
2018	3.664.629.000,00	3.063.824.202,00	83,61%
2019	4.396.680.000,00	3.767.280.400,00	85,68%

Gambar 8
Persandingan Realisasi Anggaran Satker Setjen
Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019

Realisasi Anggaran
Satker Setjen
Tahun 2016 – 2019



Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa Capaian kinerja Keuangan Biro KSAP terus meningkat dari tahun ke tahun, Tahun saja peningkatan itu berkat kerjasama seluruh jajaran dilingkungan Biro KSAP maupun Deputi Bidang Persidangan dan unit terkait.

D. Kinerja Lain-lain

Pada Tahun 2019, Biro KSAP berhasil melaksanakan penugasan Setjen DPR RI dalam sebagai unit zona integritas dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI. Biro KSAP telah berhasil melakukan program-program penguatan unit kerja Biro KSAP baik dalam hal akuntabilitas, ketatalaksanaan, peningkatan SDM, dan Kualitas pelayanan publik. Hal ini antara lain dengan adanya website BKSAP yang memuat berbagai informasi kegiatan yang dilakukan oleh BKSAP dan dapat diakses publik. Selain itu peningkatan indeks kepuasan atas layanan Biro KSAP juga diperoleh hasil dengan kualitas Baik. Survey ini disebarakan kepada Anggota BKSAP setelah mereka melakukan kegiatan

menghadiri rapat-rapat di BKSP, FGD, maupun menghadiri sidang di Luar Negeri. Hasil Survey terlampir.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Setjen DPR RI pada tahun 2019 tentang indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap layanan Diplomasi Parlemen, dari 215 responden yang menyatakan sangat puas sebanyak 65 responden atau 30,23 persen dan menyatakan puas sebanyak 147 responden atau 68,37 persen, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 3 responden atau 1,40 persen, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. Hal ini merupakan capaian yang menggembirakan bagi Biro KSAP, namun menjadi tantangan agar kedepan tidak ada lagi responden yang menyatakan tidak puas atas layanan diplomasi parlemen yang dilakukan oleh Biro KSAP.

Capaian lain yaitu, Biro KSAP menjadi Juara kedua (Silver Winner) untuk kategori Alat Kelengkapan DPR RI pada pemeringkatan PPID dilingkungan Setjen DPR RI pada bulan April 2019. Sebagai bagian dari unit pelayanan yang mendukung DPR RI menjadi Parlemen modern dan terbuka, Biro KSAP terpacu untuk lebih meningkatkan dukungannya kepada dewan dalam mensosialisasikan kegiatan diplomasi parlemen kepada publik. Pada tahun 2019, Biro KSAP membentuk Tim untuk mengelola muatan dari website BKSAP yang berada di laman website DPR RI serta media sosial BKSAP lainnya seperti instagram, twitter dan youtube. Upaya ini dilakukan dalam rangka mendukung terwujudnya BKSAP DPR RI yang telah terbuka dan modern.

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Biro KSAP Tahun 2019 merupakan akhir untuk keanggotaan DPR RI periode 2014-2019 Secara umum seluruh target yang diperjanjikan pada tahun 2019 telah memiliki capaian 100% yaitu:

1. Persentase dukungan kegiatan kerjasama internasional yang sesuai standar, memiliki nilai capaian 100%
2. Persentase dukungan kegiatan kerjasama Regional yang sesuai standar, memiliki nilai capaian 100%
3. Persentase dukungan kegiatan kerjasama Bilateral yang sesuai standar, memiliki nilai capaian 100%
4. Persentase dukungan kegiatan kerjasama Diplomasi Perorangan yang sesuai standar memiliki nilai capaian 100%

Sebagai penanggungjawaban Komitmen untuk Anggaran Satker Dewan maupun Satker Setjen, Tahun 2019 capaian kinerja Keuangan untuk Satker Dewan sebesar 83,71% dari Pagu sebesar Rp.Rp.106.559.712.000,00, atau setara dengan Rp.89.196.771.454,00. Capaian kinerja keuangan untuk Satker Setjen sebesar 85,68% dari Pagu RP.4.396.680.000,00, atau setara dengan Rp. 4.767.280.400,00.

Capaian kinerja BKSAP dapat terwujud dengan berbagai upaya yang telah dilakukan seperti komunikasi yang intensif dan efektif dengan multistakeholder maupun pengguna layanan baik internal maupun eksternal, koordinasi, rapat-rapat yang efektif, peningkatan budaya kerja yang lebih cepat dan efektif, revisi anggaran, dan peningkatan kapabilitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Biro KSAP.

Kendala yang ditemukan dalam melakukan pelayanan kepada Dewan dalam kegiatan Diplomasi Parlemen adalah singkatnya waktu persiapan, padatnya kegiatan kekurangan SDM, dan lain-lain.

Sebagai salah satu unit Zona integritas di lingkungan Setjen DPR RI, Biro KSAP telah mencapai target yang ditetapkan kendati harus meningkatkannya lagi agar mendapat nilai yang memuaskan antara lain dengan mendapatkan inovasi.

B. Rekomendasi

- 1) Untuk mencapai target yang lebih optimal, maka Biro KSAP perlu melakukan banyak terobosan, serta perencanaan Anggaran yang lebih tepat guna dan dapat dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang.
- 2) Membangun sistem kerja yang lebih baik tentu saja diperlukan bagi peningkatan kinerja Biro KSAP seperti memperbanyak membuat Standar Operasional Prosedur yang ada di lingkungan Biro KSAP, membuat sistem evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan SOP yang sudah ada, peningkatan kedisiplinan, ketepatan waktu, membuat maklumat pelayanan, dan sistem survey kepada Anggota Dewan dan masyarakat yang lebih baik dan meluas, sistem komunikasi digital dengan publik yang lebih mudah, dan peningkatan kualitas website maupun media sosial yang dimiliki BKSAP.
- 3) Terkait zone integritas, maka Biro KSAP diharapkan untuk terus membuat inovasi yang besar manfaat bagi kepentingan publik/*stake holder*.